

KESIAP-SIAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BENCANA ALAM

~ Kasus di Si Tellu Tali Urang Jehe ~

Sugiyanto

ABSTRACT

Family Social Conditional Research in Disaster Management, constitutes a case research in Si Tellu Tali Urang Jehe district, Pakpak Bharat regency, with the purpose of research : Identified region which convert hazard level, vulnerability and capacity of citizen against hazard risk; acquired description about the alertness of society in management of natural disaster, covers : Pre, Period and After natural disaster; identified the capacity rise need of society in management of natural disaster and this research has the quality of qualitative descriptive. The condition of Pakpak Bharat regency area generally and specially in Si Tellu Tali Urang Jehe district in hilly, so it is sensitive against landslide. Yet from the disaster happened there many times, the society has been able to predict what natural phenomenon will happen in their area, specially flood and landslide. The copacity of family in predicting the natural phenomenon was acquired from experience (learing procedd and understanding from the previous incident). Yet the result of understanding is less socialized to next generation. From the observation during thair stay in the area, the society has known some points of sensitive location of disaster and the plascement of POSKO (Command Post) if disaster happens. Regional administration respond and his apparatuses of sector instancy in bullding the alertness of the society is high enough, though it is not supported by PORTAB yet. For that, the decree of Pakpak Bharat regent No. 16/2006 on February 9,2006 in order to be able to be made reference for arrange ment of PORTAB.

Keyword : Disaster Management.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki 240 gunung berapi. 70 di antaranya masih aktif. Menurut (DVMBG Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) 28 wilayah di Indonesia dinyatakan rawan gempa dan tsunami, di antaranya Sumatra Utara, Hampir setiap tahun terjadi bencana alam. Setiap kali terjadi gempa hebat, tanah longsor atau banjir selalu menelan korban jiwa manusia. Berdasarkan data dari Pusdatin Departemen Sosial, rekapitulasi korban bencana alam pada tahun 2007 mencapai 35.549 jiwa (Pusdatin. 2007).

Setiap terjadi bencana alam, masyarakat tercerai berai selama proses penyelamatan diri, dan tidak sempat membawa surat/dokumen penting, sebagai kelengkapan perlindungan hukum. Selain kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda setiap bencana selalu diikuti dengan bertambah besarnya permasalahan sosial yang semakin kompleks, yang tentu menambah permasalahan sosial yang ada. Angka kemiskinan dan ketelantaran menjadi semakin besar; sementara itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lebih terkonsentrasi pada pelayanan darurat (emergency response).

Masalah kesehatan yang dialami pengungsi di lokasi penampungan, seperti penyakit diare akut dan infeksi saluran

pernafasan sebagai akibat kurangnya air bersih, toilet dan buruknya sanitasi; perencanaan keluarga berantakan karena ketidakpastian kapan masa pengungsian berakhir. Hilangnya harta benda, pekerjaan, dan ketelantaran pendidikan anak semakin mempersulit proses pemulihan kehidupan keluarga.

Kondisi di atas mengisyaratkan perlunya membangun kesiap-siagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam pengertian kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesiap-siagaan tersebut meliputi: kesiap-siagaan masyarakat dalam masalah-masalah kemanusiaan sebelum terjadi bencana (*pra bencana*); kesiap-siagaan masyarakat dalam penyelamatan (*ketika bencana alam itu terjadi*) dan kesiap-siagaan masyarakat dalam proses pemulihan kondisi lingkungan (*pasca bencana*). Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penelitian kesiap-siagaan masyarakat dalam pengelolaan bencana alam.

B. Masalah Penelitian

Penanganan akibat bencana alam telah menjadi isu dan gerakan global. Di Indonesia penanggulangan bencana alam juga menjadi isu yang dibahas mulai dari lingkungan masyarakat bawah, perguruan tinggi sampai di tingkat elite. Dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana alam sangat besar. Namun permasalahan yang tersisa masih sangat besar.

Kondisi ini menunjukkan demikian adanya keterbatasan pemerintah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Sehubungan dengan itu, pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana kesiap-siagaan masyarakat dalam pengelolaan bencana alam, sehingga tidak mengalami kerugian yang sangat besar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah:

1. Teridentifikasinya wilayah yang meliputi tingkat ancaman bencana (*hazard*), *vulnerability* dan *capacity* warga terhadap risiko bencana
2. Diperolehnya deskripsi tentang kesiap-siagaan masyarakat dalam pengelolaan bencana alam, meliputi : pra, masa, dan pasca bencana alam.
3. Teridentifikasinya kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan bencana alam.

D. Kerangka Konsep

1. Kesiap-siagaan Masyarakat

Dalam kerangka mengurangi resiko bencana, kesiap-siagaan masyarakat di daerah rawan bencana alam merupakan salah satu aspek penting dan telah dijadikan tuntutan global dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini diyakini bahwa beberapa wilayah yang dikategorikan rawan sering kali terjadi gerak alam yang tidak dapat dikendalikan dan berpotensi (*beresiko*) merusak kehidupan masyarakat. Gunawan dkk (2007), unsur yang terkait dalam penanggulangan bencana yakni; (1) *Publik sector* (pemerintah; instansi sektorat); (2) *Privat sector* (dunia usaha, LSM dll); dan (3) *Collective action sector* (perkumpulan masyarakat). Asumsinya, semakin tinggi kesiap-siagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam, maka resiko bencana yang terjadi akan semakin kecil (*berbanding terbalik*).

Konsepsi tentang kesiap-siagaan disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 pada Bab I pasal 1 ayat 7, bahwa kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Uraian ini mengindikasikan, bahwa kesiap-siagaan lebih menunjuk pada upaya masyarakat (serangkaian kegiatan) secara terorganisasi.

2. Bencana Alam

Secara harfiah, bencana dapat dipahami sebagai fenomena dalam suatu proses peristiwa yang berdampak buruk pada manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bencana sebagai suatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya. Dari pengertian ini, Bencana dapat terjadi baik karena kesalahan manusia maupun oleh gerak alam yang terkadang tidak dapat dikendalikan dan bersifat merusak kehidupan manusia. Menurut

Departemen Sosial (Dit BSKBA, 2003), Bencana Alam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban manusia, penderitaan, kerugian, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan dan ekosistemnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Bencana yang disebabkan oleh gerak alam dapat datang dari gerak bumi yang menimbulkan gempa, gerak angin yang menimbulkan badai siklon raksasa, gerak magma yang menimbulkan letusan gunung berapi, gerak air laut yang menimbulkan gelombang pasang (Tsunami), gerak air sungai dan hujan yang menimbulkan banjir, gerak tanah yang menimbulkan kelongsoran, gerak cuaca yang menimbulkan panas dan kemarau panjang, serta gabungan dari beberapa komponen alam yang mampu membinasakan manusia dalam lingkup luas. Bencana juga dapat terjadi karena kerusakan lingkungan. Dalam pengertian ini kerusakan lingkungan akibat eksploitasi (penambangan, penebangan/penggundulan hutan, perkebunan, perumahan), dan perlakuan manusia dalam mengelola sampah.

3. Pengelolaan Bencana

Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006) pengelolaan bencana secara keseluruhan membutuhkan sumber daya yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang manajemen bencana (*disaster management*) yang menyeluruh dan terpadu sehingga mampu menyadarkan dan meningkatkan kepedulian semua pihak untuk mereduksi dampak akibat bencana sehingga mereka harus :

- a. Mengetahui dan mengenal beberapa jenis bencana (dibatasi hanya banjir, longsor, kekeringan, dan Tsunami).
- b. Mengetahui penyebab bencana.
- c. Mengetahui siklus pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- d. Mengetahui tindakan-tindakan bencana (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan), mulai dari preventif, mitigasi,

kesiapan sebelum terjadi bencana (pra bencana), respon dan tindakan saat bencana serta pemulihan dan penelitian setelah bencana (pasca bencana).

- e. Menjelaskan *action plan* dari masing-masing instansi, institusi atau badan.
- f. Mengajak semua pihak untuk peduli dan berperan aktif dalam pengelolaan bencana.

E. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Menurut Handari Nawawi (1983), menyatakan bahwa penelitian deskriptif melukiskan realita-realita sosial yang kompleks sifatnya dalam relevansinya dengan aspek sosiologis dan antropologis untuk mendapatkan justifikasi, perbandingan-perbandingan dan evaluasi. Prasetyo Irawan (2002) menyatakan, penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna (*means*) yang berada di balik fakta-fakta.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* (penunjukan) berdasarkan pertimbangan tingkat kerawanan (kerentanan) wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Maka lokasi penelitian tentang Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bencana Alam ini lebih dikonsentrasikan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan digali dari beberapa sumber yang ditentukan secara *purposive*. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah : (1) Warga masyarakat (keluarga(korban bencana; (2) Tokoh komunitas yang menangani bencana; (3) Tokoh masyarakat setempat (agama, pemuda, wanita, pendidikan dan adat); (4) Pengurus Orsos/LSM; (5) Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan (6) Aparat pemerintah dari instansi sektoral (Dinas Sosial). Adapun jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada matrik tersebut di bawah ini :

Matrik Jumlah Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Warga masyarakat keluarga korban bencana)	20 orang
2.	Tokoh komunitas yang menangani bencana	2 orang
3.	Tokoh masyarakat setempat (agama, pemuda, wanita, pendidikan dan adat)	5 orang
4.	Pengurus Orsos/LSM	2 orang
5.	Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan	2 orang
6.	Aparat pemerintahan dari instansi sektoral (Dinas Sosial)	2 orang
Jumlah		33 orang

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Studi Dokumentasi dan Kepustakaan; (2) Interview/wawancara; (3) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD); dan (4) Observasi Lokasi.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data dan hasil wawancara serta catatan-catatan dalam FGD, observasi dan buku-buku laporan. Sebelum dilakukan analisa, dibuat kode dan kategori hasil wawancara.

II. HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Wilayah

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Dari di Propinsi Sumatera Utara, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004. Pakpak Bharat dibagi menjadi 8 kecamatan, terdiri atas 44 desa swakarya dan 3 desa swasembada.

Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.221,3 km², yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yakni Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.

Jumlah penduduk sebanyak 37.851 jiwa menyebar di 8 (delapan) kecamatan dan 40 desa, penduduk terpadat berada di Kecamatan Salak sedangkan penduduk terjarang berada di Kecamatan Pagindar.

Berdasar dari kondisi di atas, maka lokasi penelitian tentang Kesiap-siagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bencana Alam ini lebih dikonsentrasikan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir.

Sejak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe pada Awalnya terdiri dari 5 (Lima) Desa yaitu : Desa Tanjung Meriah, Desa Tanjung Mulia, Desa Kaban Tengah, Desa Bandar Baru, Desa Simbruna. Kemudian pada Tahun 2005 Sebagai Hasil Pemerkan Desa Tanjung Meriah dan Desa Tanjung Mulia, Jumlah Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menjadi 7 (Tujuh) Desa yaitu : Desa Tanjung Mulia, Desa Tanjung Meriah, Desa Maholida, Desa Simbruna, Desa Kaban Tengah, Desa Bandar Baru, Desa Perolihen.

Dalam rangka Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sesuai dengan Otonomi Daerah, Pada Tahun 2006 terbentuk Desa Baru sebagai Hasil Pemekaran Desa Kaban Tengah, Desa Bandar Baru dan Desa Tanjung Mulia, sehingga Jumlah Desa Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menjadi 10 (Sepuluh) Desa yaitu : Desa Tanjung Meriah, Desa Simbruna, Desa Maholida, Desa Kaban Tengah, Desa Bandar Baru, Desa Perjaga, Desa Perolihen, Tanjung Mulia, Desa Mbinalun, Desa Malum.

Luas Wilayah Si Tellu Urang Jehe ± 473,62 Km². Batas Wilayah Utara : Kecamatan L. Parira, Sidikalang & S. Pungga-Pungga. Selatan, Kecamatan Salak dan Kerajaan. Barat Kabupaten Aceh Singkil, dan sebelah Timur:

Kecamatan Kerajaan. Kondisi Topografi Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe berbukit – bukit dengan ketinggian dari permukaan laut 650 – 950 M dan dataran tinggi yang bervariasi. Sebagian besar merupakan Pegunungan dan Perbukitan. Keadaan Iklim Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe pada umumnya beiklim Tropis. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan di sekitar Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe memiliki pegunungan dan Perbukitan dengan Kemiringan lereng yang bervariasi sehingga mempengaruhi keadaan iklim di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Suhu Udara umumnya berkisar antara 18 c – 28 c, dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.170 mm/Tahun atau dalam setiap bulannya rata-rata lebih dari 7 hari sehingga dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Masyarakat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe relatif Homogen, Mayoritas Suku Pakpak 99,7 % yang terdiri dari 5 (lima) Suak : Suak Simsim, Suak Pegagan, Suak Kelasien, Suak Boang dan Suak Keppas. Ditambah dengan Masyarakat yang Minoritas 0,3 % terdiri dari Suku Batak, Suku Karo, Suku Jawa, Suku Nias dan Suku lainnya. Dengan Pemeluk Agama Islam 84,8 %, Kristen Protestan 13,96 %.

B. Potensi Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 473, 62 Ha dengan komposisi Penggunaan lahan sebagai berikut : Pekarangan 19 Ha, kebun 54 Ha, lahan sawah 15 Ha, Ladang 54 Ha, penggembalaan/ternak 10 Ha, hutan negara 204,62 Ha, perkebunan 105 Ha, hutan rakyat 12 Ha. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai banyak sungai yang mengalir ke Pantai barat Aceh Singkil. Sungai (Lae) yang ada dimanfaatkan untuk pengairan, perikanan, pengembangan pariwisata dan potensi lainnya. Diantaranya:

1. Sungai (Lae) Pancur Sipitu di Desa Perjaga, Sungai ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai Irigasi untuk mengairi sawah di sekitar Desa Perjaga.
2. Sungai (Lae) Tambahan di Desa Perjaga, Sungai ini dapat digunakan untuk mengairi persawahan di sekitar Persawahan Desa Perjaga.

3. Sungai (Lae) Kacimbe di Desa Simbruna, Sungai ini sangat potensi untuk mengairi lokasi persawahan di Desa Simbruna dan masih banyak lagi sungai – sungai potensial yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang belum dikelola secara baik.

Kegiatan pertambangan dan bahan galian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe umumnya belum tereksplorasi. Kegiatan yang ada umumnya merupakan kegiatan pertambangan galian "C" terutama pasir, kerikil, dan batu yang merupakan potensi sumber daya alam yang jumlahnya cukup besar. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga memiliki Bahan Galian Tambang Timah Hitam, Batu Padas, Batu Kapur, Pasir Kwarsa dan lain-lain dimana sampai saat ini belum dieksplorasi secara Optimal.

Kegiatan Kepariwisata di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe belum berkembang walaupun banyak daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Diantaranya terdapat kawasan daerah Pariwisata sungai yaitu air terjun batu merdahup di Lae Mbara Desa Perolihen Sedangkan Panorama alam pegunungan yang indah serta hutan yang masih asri menjadi suatu daya tarik tersendiri. Disamping itu masih ada terdapat gua-gua yang kemungkinan mempunyai nilai historis. Dari keseluruhan lokasi Daerah Pariwisata yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tersebut perlu dibenahi, dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga di masa mendatang dapat menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata.

Pendidikan Formal, Tenaga Pendidik yang Profesional, Sarana Pendidikan yang Mudah dijangkau oleh Masyarakat ditambah Prasarana pendukung yang lebih baik yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan suatu proses dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini. Adapun proses peningkatan SDM dilakukan dengan Proses berjenjang yang dimulai dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Menengah Atas, Sehingga memerlukan perhatian Khusus untuk Peningkatan SDM di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang tujuannya untuk mewujudkan Manusia yang berkualitas, berprestasi dan mandiri guna

memberhasilkan Pembangunan ke depan. Adapun Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Seperti pada tabel berikut :

dan lain-lain. Hasil perkebunan rakyat seperti karet, kopi, gambir, kelapa, kelapa sawit, nilam, kulit manis dan lain-lain. Tanaman buah seperti durian, langsung, rambe, petai, jengkol dan lain-lain.

Tabel 1

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Umum
Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

No	Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru PNS	Jumlah Guru Honor
1.	SD. Negeri	11	1.460	48	28
	Min Sibande	1	161	4	8
	Mis	3	85	5	7
2.	SLTP Negeri	3	367	26	20
	MTs	3	59	2	3
3.	SLTA	1	163	8	4

Sumber : Data Laporan Bulanan Sekolah

Peningkatan sarana Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan Sumber daya Manusia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, karena pada dasarnya Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga meningkat. Adapun sarana pendukung yang lain dalam upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia tersebut yaitu dengan penyediaan Fasilitas Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Desa, dimana Fasilitas Kesehatan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke Daerah terpencil. Menurut petugas Puskesmas Sibande jumlah fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, adalah : (a) Puskesmas, sebanyak : 1 buah; (b) Puskesmas Pembantu, sebanyak 5 buah; (3) Tenaga medis, meliputi : Dokter : 3 orang, SKM : 2 orang, Bidan : 17 orang dan Perawat : 6 orang.

Sementara Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe saat ini 90 % penduduk hidup dari usaha pertanian dan perkebunan rakyat. Hasil pertanian pada umumnya adalah padi ladang, padi sawah, jagung, cabe, terong, mentimun

Mengingat kondisi geografis yang subur memungkinkan para penduduk dapat melakukan usaha peternakan karena melimpahnya tanaman hijau sebagai pakan ternak. Melalui peternakan sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, bebek dan lain-lain. Diharapkan dapat dihasilkan produk ternak berupa telur, susu, kulit, daging, madu dan lain-lain.

Dengan tersedianya air yang melimpah memungkinkan masyarakat dapat membudidayakan perikanan air tawar seperti ikan mas, lele, mujair dan lain-lain. Sumber daya yang ada di hutan sangat banyak ditemukan seperti kayu, rotan, madu lebah, damar, bambu dan lain-lain. Sehingga dapat menciptakan peluang industri kerajinan bagi masyarakat.

Rencana Strategis merupakan rencana jangka panjang Pemerintahan Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe yang dibuat secara bersama-sama antara Aparatur Pemerintah, Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan LSM. Rencana Strategis berbentuk adaptif terhadap perubahan-perubahan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun external organisasi. Hasil yang diharapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe Tahun (2004 – 2008), antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Untuk Pelayanan Pemerintah.
3. Mengembangkan Sektor Pertanian dan Perkebunan yang berorientasi kepada Pola Modern

C. Kondisi masyarakat

Jumlah Penduduk Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sampai dengan Tahun 2006 diperkirakan 9.681 Jiwa dengan jumlah 1.987 KK yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 4.870 Jiwa (50,31 %) dan Perempuan sebanyak 4.811 Jiwa (49,69 %) dengan Kepadatan Penduduk (20 Jiwa/Km). Masyarakat di Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe relatif Homogen, mayoritas Suku Pakpak 99,7 % yang terdiri dari 5 (lima) Suak : Suak Simsim, Suak Pegagan, Suak Kelasén, Suak Boang dan Suak Keppas. Ditambah dengan Masyarakat yang Minoritas 0,3 % terdiri dari Suku Batak, Suku Karo, Suku Jawa, Suku Nias dan Suku lainnya. Dengan Pemeluk Agama Islam 84,8 %, Kristen Protestan 13,96 %.

Tiga pilar lembaga yang mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat adalah : Lembaga Adat, Agama dan Pemerintah Desa, lembaga tersebut memiliki andil dalam kehidupan, mengayomi dan mempersatukan masyarakat. Masyarakat Adat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat umumnya dan khususnya di dua Desa ini, berdasarkan dialek dan daerah asal tradisionalnya terbagi lima sub, yang dalam bahasa setempat disebut dengan *Pakpak Silima Suak*, yakni *Suak Pakpak Simsim* dan *Suak Pakpak Boang*. Secara geografis sebenarnya ke lima suak tersebut menyatu atau berbatasan dengan yang lainnya. Dari kelima suak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Suak Pakpak Simsim adalah orang Pakpak yang berasal dari daerah Simsim yang sejak tahun 2003 menjadi satu kabupaten yaitu Kabupaten Pakpak Bharat. Marga (*klen*) yang berasal dari Suak Simsim tersebut antara lain : Marga Berutu, Bascin, Padang, Solin, Sinamo, Manik, Cibro, Banurea, Boangmanalu, Lembeng, Sitakar, kebeaken, tinendung, Munthe.
- b. Suak Pakpak Keppas adalah orang Pakpak yang berasal dari wilayah Keppas meliputi: Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Parbuluhan, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Dairi. Marga-marga yang berasal dari suak tersebut antara lain : Marga Ujung, Bintang, Bako, Berampu, Pasi, Maha, angkat, Capah, Saraan.
- c. Suak Pegagan berarti warga Pakpak yang berasal dari Pegagan. Secara administrasi pemerintahan meliputi wilayah Kecamatan Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tigalingga dan lainnya di Kabupaten Dairi. Marga-marga yang berasal dari suak ini antara lain : Marga Lingga, Matanari, Kaloko, Manik, Sikettang, Maibang, Munthe.
- d. Suak Kelasén adalah orang Pakpak berasal dari wilayah Kelasén. Berbeda dengan ke tiga suak di atas, Suak Kelasén ini berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Marga-marga yang ada di wilayah ini antara lain : Tanambunen, Tumangger, Anak Ampun, Gajah, Berasa, Kesogihen, Sikettang, Meka, Turuten, Ceun, Pinayungen, dan Mungkur.
- e. Suak Boang adalah orang Pakpak yang berasal dari wilayah Boang. Wilayah secara administrasi berada di wilayah Aceh khususnya di Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Marga-marga yang berasal dari daerah ini antara lain : Sambo, Saran, Penarik, Manik, Bascin, Berutu, dan Boangmanalu.

Masyarakat bermukim di daerah lembah/lereng bukit atau pegunungan, yang berkonsentrasi sepanjang pinggiran jalan kabupaten (jalan yang menuju Aceh Singkil), Mereka hidup di daerah ini sudah beberapa tahun tetapi tidak pernah berpikir kalau daerah tersebut akan terkena longsor. Mereka memandang, bahwa lokasi tempat tinggalnya cukup aman.

Bagi masyarakat Pakpak Bharat (khususnya masyarakat Si Tellu Tali Urang Jehe), pegunungan atau pegunungan yang memanjang

di wilayah tersebut mempunyai arti besar dalam kehidupan. Karena sepanjang di wilayah pegunungan atau perbukitan terdapat hutan pemerintah dan hutan rakyat. Wilayah tersebut telah menghidupi petani kecil yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk. Namun semakin besarnya tuntutan kehidupan manusia, semakin besar pula sumber yang tersedia di pegunungan atau diperbukitan ini dieksploitasi oleh manusia.

Eksplorasi mulai dari penebangan pohon besar, pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan keterangan *Hormin Tumanggor* selaku Kepala Desa Tinada terdapat sepuluh titik rawan longsor. Ironisnya, kegiatan penebangan hutan rakyat yang ada di wilayah perbukitan atau pegunungan dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui rambu-rambu/peraturan dari pemerintah (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2006 tentang Fungsi Hutan. Di sisi lain kesadaran masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk pemeliharaan lingkungan masih relatif kurang. Kondisi ini tercermin dari perilaku masyarakat yang menebang pohon yang berada pinggir sungai, sesuai peraturan pohon yang boleh ditebang berada 50 meter dari tepi sungai, karena berfungsi sebagai penahan erosi. Dalam kurun waktu yang relatif lama, kondisi ini akan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

D. Kesiap-siagaan Masyarakat

1. Pada Pra Bencana Alam

Keterbatasan informasi dan rendahnya pendidikan penduduk mengakibatkan pola berfikir mereka sangat sederhana bahkan kearah tradisional. Namun masyarakat mempunyai kerangka nilai, norma, dan pemahaman yang seringkali tidak sama satu dengan lainnya. Hal tersebut tergambar, dalam mengungkapkan tentang bencana. Secara umum masyarakat mengungkapkan, bahwa bencana yang terjadi di wilayah ini merupakan ujian/cobaan yang datang dari Tuhan. Selain itu juga ada yang mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi ini adalah akibat ulah manusia yang menebang pohon sembarangan, sehingga terjadi bencana banjir, erosi dan tanah longsor. Pemahaman tersebut tiada lain merupakan hasil penumpuan pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana dari generasi ke generasi.

Secara umum, masyarakat telah mengetahui beberapa titik yang rawan terhadap bencana longsor, bahkan juga secara tradisional masyarakat telah mengetahui tanda-tanda sebelum terjadi bencana. Tanda-tanda tersebut untuk membangun sistem peringatan dini, penguatan kembali pengetahuan tradisional dalam menghadapi bencana. Tanda-tanda akan terjadi bencana itu antara lain melalui suara dari binatang siamang (*imbo*) atau melalui penghulu balang (*Mejan*). *Mejan* adalah sebuah patung berbentuk manusia terbuat dari batu yang mempunyai kekuatan *magic* yang dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat yang telah terbiasa hidup tenang, dan tidak pernah berfikir akan terjadi bencana, maka kepekaan masyarakat terhadap tanda akan terjadinya bencana tersebut semakin berkurang. Apalagi di kalangan umat muslim kepercayaan tersebut dianggap "*musrik*" kata mereka.

Selama tinggal di daerah tersebut, masyarakat belum pernah memperoleh penyuluhan tentang kondisi lingkungan yang rawan bencana, dan dapat mengancam kehidupannya. Dengan keterbatasan tersebut apabila terjadi bencana menurut pengakuan salah satu responden adalah pasrah, atau sementara mengungsi ketempat saudara yang relatif aman dan tidak terkena bencana.

2. Pada Masa Bencana Alam

Dalam proses penyelamatan diri, setiap warga masyarakat berusaha untuk mengevakuasi anggota dan harta yang dimiliki. Namun proses untuk mengeksekusi tindakan penyelamatan tersebut sering kali tidak secepat proses terjadinya bencana, sehingga harta yang dibawa pun relatif terbatas (sesuai dengan kemampuannya) bahkan banyak diantaranya yang tidak sempat membawa aset yang mereka miliki kecuali pakaian yang melekat di badan. Persoalan pertama yang harus segera dijawab pada saat itu adalah kemana mereka akan berlindung, dan bagaimana mereka dapat mengakses tempat perlindungan tersebut. Bagi mereka yang mempunyai saudara yang tinggalnya relatif dekat dan aman, dan atau orang yang relatif mampu secara ekonomi, mungkin akan segera terjawab.

Wilayah yang menjadi tujuan masyarakat adalah tempat-tempat yang menurut pertimbangannya aman. Misalnya ke daerah

yang lebih tinggi dan menurut pandangannya daerah itu relatif aman atau ditempat saudara yang lokasinya relatif aman tidak kena bencana. Secara umum, tempat aman yang menjadi pilihannya adalah tempat yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Pertimbangannya agar sewaktu-waktu dapat mengawasi kondisi rumahnya. Ketika kondisi mulai normal mereka segera berbenah dan memanfaatkan harta benda yang masih tersisa.

Selama proses penyelamatan, partisipasi masyarakat mempunyai peran yang cukup besar baik secara individu maupun kelompok. Bentuk partisipasi dalam penyelamatan ini terlihat dari dukungan dalam bentuk peralatan, tenaga, pikiran yang tuangkan dan pemberian informasi lokasi untuk penyelamatan secara spontanitas. Selama proses penyelamatan, masyarakat dibantu pemerintah yang didukung TNI dan POLRI. Dalam penanggulangan bencana ternyata tetap saja ada keterbatasan. Transportasi terputus yang mempersulit penjangkauan, akibatnya ada sejumlah masyarakat yang belum terlayani selama beberapa hari. Selama proses penyelamatan, masyarakat adat belum banyak terlibat dalam Tim Tagana.

Bencana yang terjadi di daerah ini, selain disebabkan oleh adanya faktor alam juga adanya ulah manusia itu sendiri. Adapun yang disebabkan oleh faktor alam karena Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya dan khususnya Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe merupakan daerah tropis yang berada di antara dua lempengan tektonik yang saling bertumbukan, jenis bencana alam yang biasanya dialami adalah gempa bumi. Untuk bencana yang tidak sepenuhnya alamiah, mungkin banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan menempati urutan yang tinggi. Berbagai jenis bencana tersebut mempunyai sifat berbeda, karena setiap bencana juga tidak seragam dan mempunyai kekuatan berbeda-beda pula. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2000 dan tahun 2006 merupakan yang terbesar di wilayah Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe.

Bencana tersebut terkait dengan curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu ditambah dengan kerusakan lingkungan alam di pegunungan atau perbukitan akibat penggundulan hutan oleh masyarakat dan para pemegang HPH tidak akan luput mengirim

banjir rutin ke beberapa daerah pemukiman. Air hujan yang mengalir dari bukit atau pegunungan tidak hanya membawa lumpur, pasir, kayu namun juga membawa bebantuan. Sehingga menyapu pemukiman penduduk yang berada di lembah bukit atau lereng pegunungan dan menimbun badan jalan, merobohkan jembatan serta menghancurkan lahan pertanian penduduk. Dua jembatan besar hancur total, sehingga tidak dapat dilalui, yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan pendistribusian bantuan. Selain itu juga berbuntut adanya bencana tanah longsor di sekitar wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat 10 titik lereng pegunungan atau perbukitan yang telah mengalami rawan longsor.

Dampak dari bencana banjir dan tanah longsor dapat mengakibatkan perubahan yang mendadak, karena bencana tersebut tidak hanya sebatas merusak lingkungan fisik antara lain : merusak rumah penduduk serta lahan pertanian dan perkebunan, tetapi juga pada tatanan sosial. Namun bencana yang terjadi di wilayah ini pada tahun lalu tidak separah di Aceh maupun Yogyakarta, masih dapat dikategorikan bencana lokal, sehingga dampak psikologisnya masih mudah diatasi.

Namun bencana tersebut bisa secara langsung mengguncang usaha, bisa pula secara tidak langsung mengguncang titik-titik penting dalam rantai asupan dan keluaran usaha dari kota ke desa ini. Sehingga terjadi rasa tidak keseimbangan pasokan dan permintaan, akibat hancurnya infrastruktur, salah satunya adalah akibat putusnya jembatan. Dampak dirasakan masyarakat adalah mahalanya bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

3. Pada Pasca Bencana Alam

Kerusakan yang terjadi akibat bencana tanah longsor antara lain : jalan di sepanjang jalan Kabupaten, terimbunan tanah longsor ke badan jalan di atas jembatan menuju Kuta Onan sepanjang 200 m. Parit longsor sepanjang ± 10 m di jalan menuju Kuta Onan Desa Kaban Tengah. Terdapat longsor tanah ke badan jalan di 5 titik menuju Dusun Sipede Desa Maholida sehingga tidak dapat dilalui oleh Kendaraan roda 2 maupun roda 4. Parit Bubusan di Desa Sintebu Kaban Tengah ambles sepanjang ± 10 m. Terdapat 2 titik timbunan

longsor ke badan jalan menuju Dusun Terutung Bulung Desa Simbruna mengakibatkan transportasi menuju ke dusun tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. (Seksi Pemerintahan Kec. STU Jehe)

Kerusakan rumah penduduk, sebanyak 2 rumah penduduk rusak berat terkena bencana longsor di Desa Maholida, 4 rumah penduduk rusak terkena bencana longsor di Desa Tanjung Meriah. Menurut informasi Kepala Desa Desa Tanjung Meriah kerusakan lahan pertanian/areal sawah yang terparah adalah milik 11 orang warga desa seluas 81 rante, yang di tanami padi tertimbun tanah dan pasir serta batu-batuan. Sedangkan di Desa Simbruna, areal persawahan penduduk yang tertimpa banjir lumpur adalah seluas 80 rante, atau 80,0% areal persawahan penduduk. (Seksi Pemerintahan Kec. STU Jehe).

Beberapa bulan pasca bencana tanah longsor masyarakat sudah mulai membenahi dan membangun kembali tempat tinggalnya sekalipun berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai permukiman yang layak. Untuk menormalisasi kondisi tersebut masyarakat dibantu dari aparat keamanan (TNI dan POLRI). Mereka bergotong-royong atau saling bahu-membahu membersihkan badan jalan dan membikin jembatan darurat, agar asupan logistik dari kota dapat normal kembali sehingga terjadi rasa keseimbangan pasokan dan permintaan. Sehingga masyarakat tidak merasakan adanya kebutuhan bahan pokok sehari-hari mahal lagi. Selain itu juga masyarakat mulai berbenah diri untuk membersihkan tempat tinggalnya dan lingkungannya agar cepat normal kembali.

Masyarakat juga mengetahui kebijakan pemerintah tentang bantuan pelayanan untuk pemulihan bagi korban bencana alam, tetapi belum mengetahui secara jelas tentang proses dan mekanismenya. Karena masyarakat tidak dilibatkan untuk memutuskan/musyawarah dalam penentuan jenis bantuan dan mekanismenya serta pendistribusiannya. Bantuan yang diterima oleh masyarakat pada saat bencana adalah bahan makan meliputi: Beras, Sarden, Mie instan, pakaian layak pakai serta obat-obatan. Sedangkan pasca bencana selain mendapatkan bahan makanan juga masyarakat mendapat bantuan bahan bangunan berupa: seng, paku, semen, dll.

III. ANALISIS SITUASI

Dampak bencana tanah longsor tidak hanya pada masyarakat yang berada di lereng/lembah perbukitan atau pegunungan, namun juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang berada di wilayah Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe bahkan meluas di luar wilayah tersebut. Menurut pendapat Robert J. Kodoatie dan Roestam Syarif (2006), stabilitas tanah pada lereng dapat terganggu akibat pengaruh alam, iklim dan aktivitas manusia. Agar stabilitas tanah tetap terjaga pada daerah lereng perlu ditanami tumbuh-tumbuhan, karena akar pohon yang tumbuh pada lereng akan menambah kestabilan tanah. Selain itu akan dapat mengurangi kadar air tanah, karena sebagian air diserap oleh tanaman.

Longsor tersebut terjadi karena ketidakseimbangan gaya yang bekerja pada lereng atau gaya dorong di daerah lereng lebih besar dari gaya tanah yang ada di lereng tersebut. Parameter lereng yang berpengaruh antara lain: kemiringan jenis tanah, kohesi, sudut geser, berat tanah, air yang mengalir kedalam yang menimbulkan lereng dalam kondisi jenu air (*saturated*). Oleh karena itu, jika penebangan dan perbaikan lingkungan masih terabaikan oleh pemerintah dan masyarakat, maka bencana banjir dan tanah longsor dapat terjadi setiap saat, bahkan dampak yang ditimbulkan cenderung lebih besar.

Terkait dengan kondisi tersebut, untuk menghadapi bencana di wilayah yang rawan bencana alam minimal terdapat 3(tiga) tahapan, yakni *pertama*: membangun kesiapsiagaan keluarga dalam kondisi normal (*pra bencana*); *kedua*, membangun kesiapsiagaan keluarga untuk penyelamatan (*masa terjadi bencana*); dan *ketiga* membangun kesiapsiagaan keluarga untuk pemulihan (*pasca bencana*).

Pada tahap membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, kegiatan yang sudah dilaksanakan lebih terkonsentrasi pada pencegahan agar tidak terjadi bencana (*kesadaran lingkungan*), misalnya penentuan hutan yang dilindungi. Sedangkan untuk kegiatan penyiapan masyarakat (*khususnya keluarga*) jika sewaktu-waktu terjadi bencana masih relatif kurang.

Dalam kerangka koordinasi penanggulangan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor 16/Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006. Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat. Susunan keanggotaan satuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi adalah instansi/dinas teknis terkait.

Walapun telah ditetapkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor 16/Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006. Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat, namun koordinasi penanggulangan bencana di lapangan belum optimal sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri karena belum didukung oleh program tetap masing-masing Satker. Optimalisasi dari operasi penanggulangan harus ada Portap dari Kabupaten yang tidak lanjut oleh program tetap dari masing masing satuan kerja yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi.

Kebutuhan pelayanan pada pasca bencana tidak hanya sebatas pada pemulihan kondisi keberdayaan keluarga, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana penyelamatan keluarga dan perlindungan hutan. Dalam kerangka penanggulangan ini, pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi dilematis. Di satu sisi, alam tidak boleh dieksploitasi, di sisi lain keluarga membutuhkan potensi dan sumber yang tersedia di lingkungannya untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu program yang dapat menjawab kebutuhan tersebut adalah relokasi. Jika relokasi dijadikan sebagai alternatif jawaban, permasalahan yang perlu mendapat pertimbangan adalah, di mana lokasi yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Mengingat kuatnya adat dan hak ulayat yang berlaku di Kabupaten Pakpak Bharat, maka permasalahan relokasi tidak berhenti pada penentuan lokasi yang sesuai bagi mereka. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya kesepakatan antara pemerintah dan tokoh adat (pemilik hak ulayat dan masyarakat yang direlokasi) agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar dan lebih kompleks.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe adalah berbukit-bukit, sehingga rawan terhadap bencana tanah longsor. Namun dari beberapa kali terjadi bencana masyarakat sudah dapat memprediksi fenomena alam apa yang akan terjadi di daerahnya, khususnya banjir dan tanah longsor.

Keberdayaan keluarga dalam memprediksi fenomena alam didapat dari pengalaman (proses pembelajaran dan memahami dari kejadian sebelumnya). Namun pemahaman tersebut kurang tersosialisasi ke generasi berikutnya, karena ada sebagian pandangan percaya dengan adanya tanda-tanda kejadian alam seperti "mejan" dan sebagainya adalah "musrik", sehingga kepekaan masyarakat terhadap tanda akan terjadinya bencana semakin berkurang. Dari pengamatan selama hidup di daerah tersebut, masyarakat telah mengetahui beberapa titik lokasi rawan bencana dan titik lokasi yang aman dari bencana sebagai lokasi pengungsian atau penempatan POSKO apabila terjadi bencana.

Respon pemerintah daerah dan aparatnya dari instansi sektor dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat cukup tinggi. Di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten telah mempunyai acuan penanggulangan bencana, namun di Kabupaten Pakpak Bharat belum mempunyai acuan tersebut sehingga masih mengacu pada Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor 16/Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006. Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat.

B. Rekomendasi

Dalam kerangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam pengelolaan bencana alam, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan

- konflik kebutuhan di kalangan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Persepsi yang diharapkan dapat terbangun adalah pegunungan dan hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat banyak dan sebagai wilayah yang dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi. Disamping itu program penanggulangan bencana alam bukan hanya tanggung jawab salah satu instansi/ lembaga, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan sinergis yang melibatkan seluruh unsur yang ada.
- b. Untuk mencegah agar tidak terjadi bencana, dan mengurangi resiko bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Perlu adanya Pemetaan Lokasi Rawan Bencana untuk menentukan titik rawan bencana. Pemetaan Lokasi aman Bencana untuk menentukan: Titik lokasi penyelamatan (penampungan pengungsi), Konsentrasi pelayanan, Penentuan Lokasi untuk relokasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah konsentrasi cagar alam, pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan hutan.
 - c. Perlunya adanya penyuluhan dan bimbingan dalam menghadapi bencana terhadap seluruh masyarakat mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa.
 - d. Berbagai pihak yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor 16/Tahun 2006 tanggal 9 Pebruari 2006. Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi dari hasil keputusan tersebut, agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan PROTAB masing-masing pihak yang mempunyai komitmen dalam Penanggulangan Bencana, secara menyeluruh mulai dari pra (kegiatan yang harus dilakukan pada kondisi normal), masa penyelamatan (evakuasi dan bantuan pelayanan darurat) sampai dengan pasca bencana (pemulihan).
 - e. Mengingat Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai 3(tiga) pilar yang menjadi panutan masyarakat, maka optimalisasi strategi ini perlu dibangun kemitraan dari tiga unsur tersebut. Dalam konteks ini untuk memberikan penghargaan adat (pemberdayaan adat).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI, (2003). *Pedoman Umum Bantuan Sosial Bencana Alam*, Jakarta : Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam- Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial.
- Gunawan dkk (2007). *Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam; Studi Tentang Sosial Masyarakat Dalam Management Bencana*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial-Departemen Sosial RI.
- Irawan, Prasetya (2002). *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press.
- Melly G. Tan (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat* dalam Sminta Susanto dan E. Kristi Poerwandari (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Saejana UI Bekerja Sama Dengan Harian Kompas dan Yayasan Obor, Jakarta.
- Menurut Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu (Banjir, Kongsor, Kekeringan dan Tsunami*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Nawawi, Handari (1983). *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Pranarka, A.M.W & Moeljanto, Vindyandika (1996). *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Syamsul Ma'arif (2008). *Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta Badan Nasional Penggulangan Bencana.

BIODATA PENULIS :

Sugiyanto, S.Pd.,M.Si., lahir di Tawangharjo 8 Januari 1961. Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik, Kekhususan Pengembangan Masyarakat (S2), diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2005) dan S1 (Sarjana Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara) diperoleh dari Sekolah Tinggi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (STPIPS) YAPSI Jayapura (1994). Jabatan peneliti : Peneliti Muda Bidang Kesejahteraan Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Aktif mengikuti kegiatan penelitian bidang kesejahteraan sosial, dan berbagai seminar permasalahan sosial di Indonesia. Beberapa hasil penelitiannya telah diterbitkan, baik secara mandiri maupun kelompok, dan tulisannya pernah diterbitkan di JURNAL maupun INFORMASI.